



**RENCANA KERJA  
TAHUN 2024  
DINAS  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KOTA PONTIANAK**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana mendasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan mengacu Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Rancangan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang berisikan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah Kota Pontianak untuk 1 (satu) tahun. Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
	2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
	2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	13
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	35
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	43
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	58
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	60
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	60
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	62
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
BAB V	PENUTUP	94

## DAFTAR TABEL

TABEL 1	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
TABEL 2	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK	19
TABEL 3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024	43
TABEL 4	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK	59
TABEL. 5	LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN MISI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 – 2024	61
TABEL. 6	RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK	65
TABEL. 7	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TAHUN 2024	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementrian dengan program-program Pemerintah Kota Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam menyusun Renja Perangkat Daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang disusun terkadang merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif. Setelah melalui proses pembahasan dalam forum Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah yang merupakan Rencana Kerja satu tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- c. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib dan pilihan pelayanan dasar bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian serta Bidang Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan melalui Program :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Daerah
4. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## 1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah ini yaitu:

- a. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
- b. Sebagai acuan dalam menuangkan Program/Kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
- c. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- d. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan SKPD

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



## BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab ini memuat antara lain : Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

## BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

## BAB V : PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan hasil seperti pada lampiran Tabel 2.1. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dari 67 indikator yang tersebar dilima program, capaian realisasi sebagian besar tercapai, namun ada juga indikator yang belum tercapai 100% hal tersebut disebabkan masih adanya kontrak kerja berupa penawaran yang tidak sesuai dengan target keuangannya dan adanya beberapa sub kegiatan pada rekening makanan dan minuman yang tidak terserap 100%.

Capaian kinerja tahun sebelumnya yakni tahun 2022 ada beberapa yang telah dicapai yakni keterbukaan informasi publik Indeks Refomasi Birokrasi yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah 77,74 dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menargetkan capaian kinerja berupa Indeks SPBE dengan nilai 3,31 Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh pencapaian kinerja dari Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik ditargetkan untuk dicapai dengan nilai Baik pada Tahun 2022. Untuk pencapaian target kinerja tersebut, didukung oleh pencapaian kinerja dari program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Pada program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, mempunyai indikator kinerja In Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi.

Target Kinerja program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2022 sebesar 92% dapat dicapai dan capaian realisasi program penyelenggaraan statistik sektoral adalah sebesar 128%. Sehingga untuk kinerja 2022 adalah sebesar 139,13% atau Sangat Berhasil. Salah satu penyebab tercapainya kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral dikarenakan terdapat beberapa sub kegiatan melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang semula ditargetkan 4 kali dapat dilaksanakan sebanyak 8 kali kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik memiliki indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai target kinerja sebesar 90%. Tahun 2022, jumlah penduduk Kota Pontianak adalah sebanyak 673.129 jiwa, dimana untuk usia produktif (15-65 Tahun) adalah sebanyak 466.571.

Tabel. 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
-1	-2	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
I	Urusan Komunikasi dan Informatika																		
1.	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	IKK Output I.1	10	OPD	10	OPD	5	OPD	10	OPD	30	OPD	31	OPD	5	OPD	10	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
2.	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	IKK Output I.3	5	Sistem	5	Sistem	5	Sistem	5	Sistem	30	Sistem	31	Sistem	5	Sistem	5	Sistem	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
-1	-2	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
3.	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	IKK Output II.2	29	domain / sub domain	29	domain / sub domain	29	domain / sub domain	29	Domain / sub domain	30	domain / sub domain	32	domain / sub domain	29	domain / sub domain	29	domain / sub domain	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
4.	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	IKK Output II.6	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	157	Aplikasi	128	Aplikasi	3	Aplikasi	3	Aplikasi	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
5.	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	IKK Output II.7	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	7	Aplikasi / Layanan Publik	7	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
6.	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	IKK Output II.8 dan IKK Output II.9	30	OPD	30	OPD	30	OPD	30	OPD	30	OPD	31	OPD	30	OPD	30	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
-1	-2	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
7.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	IKK Output II.12	27	OPD	27	OPD	25	OPD	27	OPD	30	OPD	31	OPD	25	OPD	27	OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
8.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	IKK Outcome III.1	96	Persen	96	persen	93	Perse n	96	persen	100	perse n	70,12	perse n	93	perse n	96	persen	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
9.	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	IKK Output III.1	6	komuni tas	6	komun itas	6	komu nitas	6	komuni tas	6	komu nitas	6	komu nitas	6	komu nitas	6	komuni tas	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
10.	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	IKK Output III.2	14	Konten	12	Konten	12	Konten	12	Konten	12	Konten	12	Konten	13	Konten	14	Konten	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
-1	-2	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13
11.	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	IKK Output III.3	4	kali	4	kali	4	kali	4	kali	12	kali	2	kali	4	kali	4	kali	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
II.	Urusan Statistik Sektoral																		
1.	Jumlah Buku Profil Daerah	IKK Output I.1	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	
2.	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	IKK Output I.6	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	100	buku	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
III.	Urusan Persandian																		
1.	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	IKK Outcome I.	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	kurang Baik	Indeks	Cukup Baik	Indeks	Baik	Indeks	Baik	Indeks	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020

NO	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH								REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI				CATATAN ANALISIS		
			TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2023				
-1	-2	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		
2.	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	IKK Output I.1	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
3.	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	IKK Output I.2	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	4	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	7	Sertifikat elektronik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020
4.	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	IKK Output I.3	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	9	sistem / kegiatan	6	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	8	sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDA GRI Nomor 18 Tahun 2020



## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Ada beberapa perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

### Program dan Kegiatan Tahun 2022

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - 1.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - 1.2. Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
    - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
    - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
    - Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
    - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - 2.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
    - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 2.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 3.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Layanan Hubungan Media
  - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
  - Manajemen Komunikasi Krisis
  - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  - Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
  - Membangun Metadata Statistik Sektoral
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 5.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Kinerja
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 5.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5.4. Kegiatan Administrasi Umum
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 5.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Program dan Kegiatan Tahun 2023**

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

1.2. Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 2.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 3.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Layanan Hubungan Media
  - Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
  - Manajemen Komunikasi Krisis
  - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  - Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
  - Membangun Metadata Statistik Sektoral
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 5.1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Kinerja
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 5.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5.4. Kegiatan Administrasi Umum
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel. 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika									
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	90 Persen	58,23 Persen	60 Persen	60 Persen	100%	70 Persen	60 Persen	66,67%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	15 Media	12 Media	12 Media	12 Media	100%	13 Media	12 Media	80,00%
Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	100%	4 Layanan	2 Layanan	50,00%
Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	98,51 Persen	91,79 Persen	93,3 Perse n	93,3 Perse n	100%	95,52 Persen	93,3 Persen	94,71%
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerinta Daerah	32 PD	31 PD	31 PD	31 PD	100%	32 PD	32 PD	100,00%
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Doku men	1 Dokum en	100%	1 Dokumen	1 Doku men	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100,00%
Kegiatan Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 PD	31 PD	31 PD	31 PD	100%	32 PD	32 PD	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100,00%
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	11,11%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Layanan	11 Layana n	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	5 Layana n	1 Layanan	6,67%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Di implementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
Bidang Urusan Statistik Sektoral									
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	69,23 Persen	38,46 Persen	46,15 Persen	46,15 Persen	100%	53,85 Persen	46,15 Persen	66,66%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Lingkup Daerah Kabupaten / Kota									
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	89 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33%
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	100,00%
Sub Kegiatan Membangun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Metadata Statistik Sektoral									
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	31 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	32 Orang	32 Orang	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	22,22%
Bidang Urusan Persandian									
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	35,48 Persen	16,13 Persen	16,13 Persen	16,13 Persen	100%	21,88 Persen	16,13 Persen	45,46%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen	44,78 Persen	8,96 Persen	17,91 Persen	17,91 Persen	100%	26,87 Persen	17,91 Persen	40,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keamanan Informasi (SMKI)								
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Doku men	1 Doku men	1 Dokum en	1 Doku men	100%	1 Dokume n	1 Doku men	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	100%	1 Laporan	1 Laporan	33,33%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	100%	1 Laporan	1 Lapor an	33,33%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100%	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	33,33%
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	79,13 Persen	16,13 Persen	32,26 Persen	32,26 Persen	100%	47,88 Persen	32,26 Persen	40,77%
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	5 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	40,00%
NON URUSAN									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keseekretarian	95 Persen	100 Persen	96 Persen	96 Persen	100%	95 Persen	95 Persen	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Per sen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Doku men	7 Doku men	6 Doku men	6 Doku men	100%	6 Doku men	6 Doku men	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100%	1 Doku men	1 Doku men	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	100%	1 Doku men	1 Doku men	100,00%



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100,00%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	31 orang / bulan	31 orang / bulan	31 orang / bulan	100%	31 orang / bulan	31 orang / bulan	100,00%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD									
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100%	3 orang	3 orang	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	8 paket	8 paket	8 paket	100%	8 paket	8 paket	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 unit	0 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	16 unit	100,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 unit	27 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100,00%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Perse n	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	41 unit	92 unit	92 unit	100%	92 unit	92 unit	100,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100,00%

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi

Hasil pemetaan literasi digital Indonesia merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah tanah air. Adapun survey indeks literasi digital Indonesia ini dilakukan secara tatap muka terhadap 10 ribu responden itu pakai metode multistage random sampling pada bulan Agustus sampai September yang disebar di 34 provinsi mencakup 514 kabupaten/kota. Diketahui dalam pengukuran indeks literasi digital Indonesia ini. Kementerian Kominfo menggunakan empat pilar, yaitu kecakapan digital (digital skill), etika digital (digital ethics), keamanan digital (digital safety), dan budaya digital (digital culture). Dari empat pilar, terdapat tiga pilar yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni pilar digital skill (dari 3,44 menjadi 3,52), digital ethics (dari 3,53 menjadi 3,68), digital safety (dari 3,10 menjadi 3,12), sementara itu pilar digital culture mengalami penurunan dari 3,90 menjadi 3,84.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sudah menerapkan digitalisasi dalam semua pelayanan publik. berdasarkan hasil survey status literasi digital yang dilaksanakan tahun 2020 oleh Kata Data Inside Center bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Indeks Literasi Digital Kota Pontianak adalah 3.59. "Hal ini menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir setiap gerak Pemkot Pontianak sudah berbasis digital. Dengan diluncurkan literasi digital ini ia berharap akan menambah semangat bagi aparatur di jajaran Pemkot Pontianak dalam mengimplementasikan smartcity di semua lini. Masyarakat juga harus diberikan literasi digital agar cakap dalam memanfaatkan sarana digital.

b. Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD

Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Data jumlah aplikasi tahun 2022 tercatat lebih dari 166, diperlukan penataan aplikasi berdasarkan clustering. Terdapat beberapa aplikasi yang melakukan penggandaan dalam proses bisnis. Adanya penataan aplikasi diharapkan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi antar

Perangkat Daerah. Penataan aplikasi dilakukan dengan rekomendasi TIK yang dapat memberikan arah standarisasi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Domain Tata kelola SPBE diperlukan dalam mewadahi integrasi seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini yang sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu dibutuhkan peta rencana arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service/layanan dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini, akan tetapi peta rencana Arsitektur terkait dengan kebijakan pusat sebagai acuan sampai saat ini belum ada

c. Tantangan dalam Transformasi Digital Penyelenggaraan Pemerintahan

Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (big data), dan kecerdasan *artifisial (artificial intelligent)*. Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan *agile organization* yang mendorong pemerintah lebih *adaptif* pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

d. Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat

Masih terdapat sejumlah blank spot (area/Kawasan yang belum dapat mengakses internet) di Kota Pontianak. Kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antarwarga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks PJJ (pembelajaran jarak jauh) dalam masa pandemi, yang mensyaratkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. Selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya



UMKM) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. Selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku UMKM juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan TIK di Kota Pontianak ke depannya.

Sedangkan untuk seluruh perangkat daerah di Kota Pontianak sampai pada Kelurahan telah menggunakan internet, namun yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika baru dilaksanakan 8 OPD yang dikelola. Adapun OPD yang dikelola internetnya terdiri dari: Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

e. Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal

Pemerintah Kota Pontianak tercatat memiliki 31 unit kerja dan 29 Kelurahan. Perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintahan atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Diskominfo sebanyak 8 Perangkat Daerah.

1. Sekretariat Daerah Kota Pontianak, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp)
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp)
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp)
4. Inspektorat Kota Pontianak, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp)
5. Satuan Polisi Pamong Praja, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp)
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp)

7. Dinas Perhubungan Kota Pontianak, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp)
8. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upload dan download max limit up to 350Mbps (full 1 core sfp).

Karena masih minimnya Unit Kerja yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti yang masih menggunakan media wireless menjadi media fiber optik. Selain itu untuk mengantisipasi saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan, sehingga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan melakukan rekonfigurasi jaringan fiber optik agar mempunyai backup link yang handal dengan tetap memperhatikan peta arsitektur SPBE Nasional.

f. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi belum optimal

Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia. Berdasarkan pemantauan Dinas Komunikasi dan Informatika tercatat tahun 2022 terjadi **132.000** percobaan serangan yang ditujukan ke sistem elektronik yang dikelola Pemda Kota Pontianak. Serangan ini berpotensi mengancam keberlangsungan layanan SPBE yang dikelola Pemda Kota Pontianak. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, pada tahun 2022 terdapat **33** insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada system informasi Pemerintah Kota Pontianak yang diakibatkan oleh kerentanan sistem yang tereksploitasi. Oleh karena itu perlu penerapan sistem manajemen keamanan informasi berbasis ISO 27001 yang di dalamnya membutuhkan dukungan kebijakan dan prosedur, perangkat pengamanan yang termutakhir, dukungan sumber daya yang memadai serta SDM yang kompeten. Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan

infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti *firewall*, *Intrusion Detection System*, *Intrusion Prevention System*, *Vulnerability Assessment Tool*, *Log Analysis*, *SIEM*. Kondisi saat ini, terdapat beberapa perangkat pengamanan seperti Next Generation Firewall yang sudah habis lisensinya sehingga database perangkat tersebut tidak dapat mendeteksi serangan-serangan siber.

Peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam perencanaan 2020 – 2024 tidak terlepas dari pelayanan pada urusan komunikasi dan informasi yang dalam mendukung visi dan misi Kota Pontianak yang ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tantangan dan peluang yang harus di hadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari tatangan dalam lingkup strategis Kota Pontianak.

Dalam **lingkup regional**, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, kota Pontianak berkedudukan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah Pembangunan B (WP B) yang terdiri dari Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, merupakan pusat pembangunan utama di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan utama pembangunan yang akan dikembangkan meliputi jasa pelayanan, perdagangan, pariwisata, dan agroindustri. Dalam hirarki pusat-pusat permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak berperan sebagai kota orde I, yang memiliki skala pelayanan regional dengan luas wilayah pelayanan mencakup sekitar 7.450 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan *positioning analysis* di atas dan kondisi riil yang ada saat ini, dalam kerangka lingkungan strategis dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi **peluang** dan **tantangan** bagi kota Pontianak dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

#### **A. Peluang**

1. Globalisasi yang tidak mengenal batas negara dan budaya memberikan peluang Kota Pontianak untuk memainkan peran di kancah internasional.

2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional sebagai implikasi dari disepakatinya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan.
4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.
5. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan kota-kota di luar Jawa khususnya Kalimantan sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah akan menopang pertumbuhan kota apabila dapat disinergikan dengan baik.

## **B. Tantangan**

1. Kondisi geografis wilayah kota Pontianak dalam konstelasi yang lebih luas (berada pada muara sistem DAS Kapuas) memosisikannya sangat rentan terpengaruh perubahan wilayah hinterlandnya seperti pencemaran logam berat akibat PETI di wilayah hulu dan deforestasi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai Kapuas yang semakin menurun sehingga intrusi air laut semakin jauh memberikan tantangan penyediaan air baku yang berkualitas dalam proses layanan air bersih.
2. Disparitas perkembangan wilayah yang masih cukup tinggi menyebabkan Pontianak sebagai tujuan pergerakan penduduk berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.
4. Dominasi kawasan yang telah maju menyebabkan terjadinya monopoli orientasi kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan perkembangan struktur wilayah yang kurang ideal.
5. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.

6. Sentra-sentra pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/wilayah yang ideal
7. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik

### Matrik Analisis SWOT RPJMD Kota Pontianak

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>STRENGTHS</b>	<b>WEAKNESSES</b>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.</li> <li>2. Keragaman budaya, serta keunikan sebagai kota Khatulistiwa modal untuk daya tarik pariwisata</li> <li>3. Lokasinya yang strategis memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa.</li> <li>4. Jumlah penduduk cukup besar dan kualitas SDM lebih baik dibandingkan wilayah hinterland-nya</li> <li>5. Hubungan sosial dan akulturasi budaya masyarakat heterogen yang semakin baik menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan.</li> <li>6. Partisipasi masyarakat yang semakin besar dalam kegiatan pembangunan.</li> <li>7. Kewenangan semakin luas memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi geografis sangat rentan terhadap bencana banjir, intrusi air laut serta angin puting beliung.</li> <li>2. Keterbatasan lahan menyebabkan harga tanah tinggi, biaya pembangunan semakin mahal.</li> <li>3. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat</li> <li>4. Sarana dan prasarana perkotaan belum ideal dan belum mampu menopang perkembangan yang terjadi</li> <li>5. Pengawasan dan pengendalian program pembangunan belum optimal</li> <li>6. Sebagai pusat orientasi berbagai kegiatan, menyebabkan menyebabkan kemacetan.</li> <li>7. Masih terjadi kesenjangan pembangunan antar kawasan kota berpotensi menimbulkan keresahan sosial.</li> <li>8. Masih ada potensi konflik dan kerawanan social antar suku, ras dan agama.</li> <li>9. Jumlah penduduk miskin masih relative tinggi.</li> <li>10. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi.</li> <li>11. Masih relative lemahnya penegakan hukum berdampak pada tingkat disiplin masyarakat yang rendah.</li> </ol>
<b>OPPORTUNITIES</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>STRATEGI W-O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Globalisasi yang tidak mengenal batas memberikan peluang memainkan peran di kancah internasional.</li> <li>2. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama internasional (<i>ASEAN Free Trade Area</i>).</li> <li>3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi.</li> <li>4. Peran dan fungsi kota Pontianak yang prospektif dalam lingkup regional, nasional dan internasional.</li> <li>5. Kebijakan nasional mengembangkan kota-kota Kalimantan sbagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.</li> <li>6. Dukungan wilayah hinterland dengan kekayaan SDA berlimpah menopang pertumbuhan kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi potensi dan keunikan kota bersinergi dengan pengembangan teknologi informasi untuk menyambut pasar bebas AFTA.</li> <li>2. Memperkuat sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas internasional untuk mendukung fungsi pusat pertumbuhan koridor barat Kalimantan.</li> <li>3. Memobilisasi potensi partisipasi aktif masyarakat sebagai sumber daya &amp; dana penunjang pembangunan.</li> <li>4. Menciptakan kelembagaan yang kuat dengan implementasi <i>good governance</i>.</li> <li>5. Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan</li> <li>6. Optimalisasi kerjasama antar wilayah</li> <li>7. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah</li> <li>8. Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota sektor tersier</li> <li>9. Mengembangkan teknologi informasi dalam kerangka e-government guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi teknologi serta masterplan pengendalian banjir dan bencana</li> <li>2. Optimalisasi lahan dengan pembangunan secara vertical</li> <li>3. Optimalisasi potensi pajak sert diversifikasi pajak daerah</li> <li>4. Pengembangan infrastuktur perkotaan dengan dukungan pendanaan propinsi dan pusat</li> <li>5. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan</li> <li>6. Evaluasi dan redesign kebijakan pengembangan transportasi kota</li> <li>7. penanganan masalah kesejahteraan social serta penggalan potensi sumber kesejahteraan sosial.</li> <li>8. Pemberdayaan UKM dan koperasi untuk meningkatkan penyebaran aktivitas perekonomian daerah serta ,ciptakan lapangan kerja</li> <li>9. Komitmen dan konsistensi implementasi rencana tata ruang</li> <li>10. peningkatan kedisiplinan melalui penegakan aturan</li> </ol>

Berdasarkan analisa SWOT diatas tantang dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Pontianak dapat di uraikan berdasarkan isu strategis dalam perencanaan urusan komunikasi dan informasi yang dapat di lihat sebagai berikut :

Peluang dan Tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pontianak

<i>Peluang</i>	<i>Tantangan</i>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semakin maju dan berkembangnya TIK.</li><li>2. Adanya berbagai ragam media informasi.</li><li>3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.</li><li>4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang alat komunikasi meningkat.</li><li>5. Luas wilayah kota pontianak yang leratif terjangkau jaringan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang informasi dan komunikasi.</li><li>2. Lemahnya jaringan layanan informasi di masyarakat.</li><li>3. Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi.</li><li>4. Adaptasi perkembangan TIK yang masih lambat.</li><li>5. Tingginya minat masyarakat dalam penggunaan alat komunikasi.</li></ol>

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Pemerintah Kota Pontianak**

**Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	70 Persen	719.466.920	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	70 Persen	719.466.920	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13 Media	719.466.920	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13 Media	719.466.920	
1.1.1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	47.432.000	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 Dokumen	47.432.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	257.668.900	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	257.668.900	
1.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	52.720.580	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	52.720.580	
1.1.4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	83.771.160	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	83.771.160	
1.1.5	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	133.066.000	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	133.066.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	118.810.000	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	118.810.000	
1.1.7	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	25.998.280	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	25.998.280	
2	Program Aplikasi Informatika	Kota Pontianak	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara	95,52 Persen	3.529.530.000	Program Aplikasi Informatika	Kota Pontianak	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara	95,52 Persen	3.529.530.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			baik sesuai ketentuan SPBE					baik sesuai ketentuan SPBE			
2.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 PD	725.000.000	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32 PD	725.000.000	
2.1.1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	110.000.000	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Dokumen	110.000.000	
2.1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	615.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	615.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 PD	2.804.530.000	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32 PD	2.804.530.000	
2.2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	2.360.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	2.360.000.000	
2.2.1	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	210.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	210.000.000	
2.2.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layan an	100.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5 Layan an	100.000.000	
2.2.3	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan	1 Doku men	50.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan	1 Doku men	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Cerdas dan Kota Cerdas		Masterplan Smart City			Cerdas dan Kota Cerdas		Masterplan Smart City			
2.2.4	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	48.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	48.000.000	
2.2.5	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	36.530.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	36.530.000	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85 Persen	461.799.740	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85 Persen	461.799.740	
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	461.799.740	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100 Persen	461.799.740	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	51.432.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	51.432.000	
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	33.066.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 Orang	33.066.000	
3.1.3	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	52.720.580	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	52.720.580	
3.1.4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	105.771.160	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	105.771.160	
3.1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	218.810.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	218.810.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Pontianak	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88 Persen	81.450.000	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Pontianak	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88 Persen	81.450.000	
4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26,87 Persen	71.450.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26,87 Persen	71.450.000	
4.1.1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	7.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Laporan	12.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1 Laporan	12.000.000	
4.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50.000.000	
4.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	2.450.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5 Perangkat Daerah	2.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88 Persen	10.000.000	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88 Persen	10.000.000	
4.2.1	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	10.000.000	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5 Perangkat Daerah	10.000.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	7.445.840.340	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	7.445.840.340	
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	27.512.800	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	27.512.800	
5.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.926.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.926.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.250.000	
5.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.250.000	
5.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.644.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.644.600	
5.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.441.400	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.441.400	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.315.076.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.315.076.000	
5.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	5.098.887.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	5.098.887.000	
5.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	211.320.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	211.320.000	
5.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.089.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.089.000	
5.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	3.780.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	3.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Semesteran SKPD		Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			
5.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	80.700.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	80.700.000	
5.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	62.700.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	62.700.000	
5.3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	18.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	18.000.000	
5.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	277.886.719	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	277.886.719	
5.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.864.764	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.864.764	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	145.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	145.000.000	
5.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	27.541.955	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	27.541.955	
5.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.880.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.880.000	
5.4.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	70.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	70.000.000	
5.4.5	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	17.600.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	17.600.000	
5.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	300.865.648	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang	100 Persen	300.865.648	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah		urusan pemerintah daerah			
5.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	67.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	67.000.000	
5.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	233.865.648	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	233.865.648	
5.5.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.337.096.427	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.337.096.427	
5.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
5.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.100.000.000	
5.5.6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	232.096.427	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	232.096.427	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	106.702.746	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	106.702.746	
5.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	36.702.746	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	36.702.746	
5.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	60.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	60.000.000	
5.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	
					12.238.087.000					12.238.087.000	

Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan untuk memantapkan Program yang berkelanjutan dan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024. Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2023 membahas Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2024 yang mencakup target program kegiatan beserta anggarannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan Program kegiatan tahun anggaran 2024 mempunyai lima (5) program, empat belas (14) kegiatan dan empat puluh tiga (43) sub kegiatan. Sasaran Dikominfo berdasarkan Renstra 2020-2024 mengampu 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien dengan indikator Indeks SPBE didukung oleh Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2. Transparansi Informasi Publik dengan indikator Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan RENJA ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program/kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan RENJA 2023 telah ditampung semuanya dalam RKPD, Oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan baik penambahan maupun penghapusan.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kota Pontianak Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika, tidak ada usulan dari masyarakat yang berkaitan di bidang Komunikasi dan Informatika yang diperuntukan secara khusus kepada untuk masyarakat yang mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi bersifat sebagai PERANGKAT DAERAH pendukung. Dengan

demikian, tidak ada usulan masyarakat yang diusung kembali dalam Perubahan RENJA Tahun 2024.

Tabel. 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
<b>N I H I L</b>					

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah “**Pontianak Kota Khatulistiwa Terdepan di Kalimantan Tahun 2025**”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak untuk periode keempat tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah dalam bidang urusan pembangunan informasi dan komunikasi dengan meningkatkan pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan berbasis E-Government dan meningkatkan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan TIK, dalam urusan bidang pembangunan persandian dengan meningkatkan penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan untuk urusan bidang statistic sectoral yaitu meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan informasi public serta meningkatkan kualitas data statistik sektoral Kota Pontianak.



Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah kinerja urusan bidang komunikasi dan informasi yang merupakan bagian dari misi Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yaitu pada Misi ke 3 (tiga) **“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”**.

Sesuai RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 pada misi ke 3 (tiga) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki indicator kinerja sasaran sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini .:

Tabel  
Logical Framework, Pencapaian Misi Pemerintah Kota Pontianak  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak  
Tahun 2020 – 2024

MISI-3	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN (RENSTRA)	TARGET					PROGRAM PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE	3 (Baik)	3,5 (Baik)	3,7 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	4,5 (Memuaskan)	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Transparansi Informasi Publik/Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
										PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
										PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Sumber : Data Olahan RPJMD 2020-2024

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mengsinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang pada Misi ke 3 (tiga) **“Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi”**, Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan

Tabel. 7  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
<b>Visi :</b>	<b>“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”.</b>						
<b>Misi 3 :</b>	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan yang kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas</b>						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks RB	71,74	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	IKM Kota	Baik	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Statistik Sektor

Sumber : Data Olahan

### 3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024, merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka

meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana kerja program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2024 dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam table Logical Frame work. Untuk Tahun 2024, terdapat 4 program urusan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan 1 program penunjang urusan pemerintah daerah. Seluruh program tersebut diuraikan menjadi 13 kegiatan dan 58 sub kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD. Hanya saja untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan melebihi dari RKPD yang disusun sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena dalam pendanaan RKPD tidak mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan. Terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran, yaitu:

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dimana merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempunyai jaringan intra pemerintah daerah yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah yang ada. Kondisi Pemerintah Kota Pontianak belum memiliki jaringan intra pemerintah daerah, dan baru mulai dilaksanakan di tahun 2022 sehingga belum mencakup seluruh Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, dimana terdapat pendanaan untuk akses internet di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dan juga beberapa area publik. Permintaan dari masyarakat terkait penyediaan akses internet di area publik belum dapat sepenuhnya diberikan.

3. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mana belum pernah dilakukan sejak tahun 2020, sedangkan sub kegiatan ini dibutuhkan untuk operasional pengamanan informasi daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
4. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, merupakan sub kegiatan yang dibutuhkan karena berpindahnya fungsi kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan ditahun sebelumnya akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memantau dan mengakomodir aspirasi public baik melalui media social maupun media konvensional lainnya. Dan merupakan salah satu tugas utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola informasi dan komunikasi pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, terkait penyediaan konten informasi pemerintah yang semakin beragam dan membutuhkan jenis media yang berbeda sehingga alokasi anggaran membutuhkan penambahan.
6. Layanan Hubungan Media, terkait kerjasama dengan media yang ada untuk penyampaian informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memperluas jangkauan masyarakat yang menerima informasi.
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terkait dengan diperlukannya penambahan server dan UPS Server seiring dengan penambahan maupun pemutakhiran aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 8 terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024.

**Tabel 6**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2. 16. 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik		70 Persen	719.466.920	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		80 Persen	748.613.612
2. 16. 02. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat		13 Media	719.466.920	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		14 Media	748.613.612
2. 16. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		4 Dokum en	47.432.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Dokum en	55.175.200

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		12 Dokum en	257.668.900	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokum en	251.435.790
2. 16. 02. 2. 01. 05.	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		2 Dokum en	52.720.580	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokum en	57.992.638
2. 16. 02. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12 Dokum en	83.771.160	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokum en	74.348.276
2. 16. 02. 2. 01. 07.	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		4 Layana n	133.066.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Layana n	150.372.600
2. 16. 02. 2. 01. 08.	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		2 Dokum en	118.810.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokum en	130.691.000
2. 16. 02. 2. 01. 11.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		1 Dokum en	25.998.280	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokum en	28.598.108

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE		95,5 2 Persen	3.529.530.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		97, 01 Persen	2.684.630.000
2. 16. 03. 2. 01.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah		32 PD	725.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 PD	825.000.000
2. 16. 03. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		1 Dokum en	110.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokum en	110.000.000
2. 16. 03. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1 Unit	615.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	715.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 03. 2. 02.	Kegiatan Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE		32 PD	2.804.530.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 PD	1.859.630.000
2. 16. 03. 2. 02. 03.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	2.360.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Unit	1.400.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 07.	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		3 Unit	210.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Unit	210.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 08.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		5 Layana n	100.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Layana n	100.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 09.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		1 Dokum en	50.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokum en	65.000.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 03. 2. 02. 10.	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	48.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	48.000.000
2. 16. 03. 2. 02. 12.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 Dokumen	36.530.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	36.630.000
	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL								
2. 20. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan data prioritas daerah		53,8 Persen	461.799.740	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		61,54 Persen	492.912.433

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 20. 02. 2. 01.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota		100 Persen	461.799.740	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	492.912.433
2. 20. 02. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		3 Dokumen	51.432.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	52.507.919
2. 20. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		32 Orang	33.066.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 Orang	35.372.600
2. 20. 02. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		2 Dokumen	52.720.580	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	57.992.638

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 20. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		32 Orang	105.771.160	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 Orang	116.348.276
2. 20. 02. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		3 Dokumen	218.810.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Dokumen	230.691.000
	<b>BIDANG URUSAN PERSANDIAN</b>								
2. 21. 02.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah		21,8 Persen	81.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		28,13 Persen	95.500.000
2. 21. 02.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)		26,8 Persen	71.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		35,82 Persen	83.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 21. 02. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan		1,00 Dokum en	7.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokum en	8.000.000
2. 21. 02. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		1,00 Lapora n	12.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Lapora n	15.000.000
2. 21. 02. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1,00 Lapora n	50.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Lapora n	55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 21. 02. 2. 01. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		5,00 Perangkat Daerah	2.450.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Perangkat Daerah	5.000.000
2. 21. 02. 2. 02.	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi		47,8 Persen	10.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		63,51 Persen	12.500.000
2. 21. 02. 2. 02. 01.	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		5,00 Perangkat Daerah	10.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Perangkat Daerah	12.500.000
	NON URUSAN								
X. XX 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keseekretarian		95 Persen	7.445.840.340			95 Persen	7.071.006.955

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X. XX 01. 2. 01.	Kegiatan Perencanaan, Panggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	27.512.800	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	27.512.800
X. XX 01. 2. 01. 01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokum en	9.926.800	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		6 Dokum en	9.926.800
X. XX 01. 2. 01. 02.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokum en	4.250.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokum en	4.250.000
X. XX 01. 2. 01. 03.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		1 Dokum en	4.250.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokum en	4.250.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X. XX. 01. 2. 01. 06.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	4.644.600	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Laporan	4.644.600
X. XX. 01. 2. 01. 07.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	4.441.400	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	4.441.400
X. XX. 01. 2. 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	5.315.076.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	5.245.562.000
X. XX. 01. 2. 02. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 orang / bulan	5.098.887.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil [DANA UMUM] - Pendapatan Asli Daerah (PAD) [DANA KHUSUS] - Dukungan		31 orang / bulan	5.026.503.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Tambahan DAU Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			
X. XX. 01. 2. 02. 03.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	211.320.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	213.720.000
X. XX. 01. 2. 02. 05.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.089.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	1.089.000



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X. XX. 01. 2. 02. 07.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		12 Laporan	3.780.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	4.250.000
X. XX. 01. 2. 05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	80.700.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	85.700.000
X. XX. 01. 2. 05. 02.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	62.700.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 paket	67.700.000
X. XX. 01. 2. 05. 09.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 orang	18.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 orang	18.000.000
X. XX. 01. 2. 06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	277.886.719	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	293.021.955

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X. XX. 01. 2. 06. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	8.864.764	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 paket	9.000.000
X. XX. 01. 2. 06. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 paket	145.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 paket	145.000.000
X. XX. 01. 2. 06. 05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	27.541.955	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 paket	27.541.955
X. XX. 01. 2. 06. 06.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		12 Dokum en	8.880.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Dokum en	8.880.000
X. XX. 01. 2. 06. 09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Lapora n	70.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Lapora n	85.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X. XX. 01. 2. 06. 11.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5 Dokumen	17.600.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 Dokumen	17.600.000
X. XX. 01. 2. 07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	300.865.648	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	459.657.200
X. XX. 01. 2. 07. 05.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		16 unit	67.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 unit	30.000.000
X. XX. 01. 2. 07. 06.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20 unit	233.865.648	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		32 unit	429.657.200
X. XX. 01. 2. 08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	1.337.096.427	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	852.553.000
X. XX. 01. 2. 08. 01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	5.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	6.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X. XX. 01. 2. 08. 02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1.100.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	600.000.000
X. XX. 01. 2. 08. 04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	232.096.427	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	246.553.000
X. XX. 01. 2. 09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 Persen	106.702.746	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		100 Persen	107.000.000
X. XX. 01. 2. 09. 02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2 unit	36.702.746	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 unit	37.000.000
X. XX. 01. 2. 09. 06.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		92 unit	60.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		92 unit	60.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X. XX. 01. 2. 09. 09.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		1 unit	10.000.000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 unit	10.000.000
					12.238.087.000				11.092.663.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan pendanaan untuk anggaran dan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun anggaran 2024 yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, rencana kerja ini upaya dalam pencapaian sasaran kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan bidang urusan statistik.

Target anggaran Rencana Kerja Tahun 2024 menggunakan pagu dari renstra sebesar Rp.12.747.194.992,- sedangkan kebutuhan yang diperlukan sebesar Rp.12.238.087.000,- sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp.509.107.992,- dan diharapkan dari anggaran tersebut diutamakan sub kegiatan yang prioritas. Untuk itu perlu diambil Langkah-langkah dalam menentukan sub kegiatan prioritas, antara lain :

1. Dalam menentukan sub kegiatan dan penyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan.
2. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling diperlukan untuk dilaksanakan.
3. Anggaran pada sub kegiatan merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh
4. Anggaran memerlukan adanya dukungan dari Pengguna Anggaran, sehingga setiap PPTK kegiatan mengetahui kewenangan dan kewajibannya.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja pegawai dalam melakukan suatu kegiatan.
6. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas ini dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2024, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas komunikasi dan informasi Kota Pontianak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 7  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
 Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tahun 2024

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	70	Persen	719.466.920	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13	Media	719.466.920	
Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	Dokumen	47.432.000	
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen	257.668.900	
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	Dokumen	52.720.580	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen	83.771.160	
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Hubungan Media	4	Layanan	133.066.000	
Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	Dokumen	118.810.000	
Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	25.998.280	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Pontianak	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	95,52	Persen	3.529.530.000	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah	32	PD	725.000.000	
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Dokumen	110.000.000	



Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Unit	615.000.000	
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	32	PD	2.804.530.000	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	2.360.000.000	
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	Unit	210.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	5	Layanan	100.000.000	
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	50.000.000	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	48.000.000	
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	36.530.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	53,85	Persen	461.799.740	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	100	Persen	461.799.740	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	Dokumen	51.432.000	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32	Orang	33.066.000	
Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Dokumen	52.720.580	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32	Orang	105.771.160	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	3	Dokumen	218.810.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Pontianak	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	21,88	Persen	81.450.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	26,87	Persen	71.450.000	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1,00	Dokumen	7.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1,00	Laporan	12.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1,00	Laporan	50.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	5,00	Perangkat Daerah	2.450.000	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi	47,88	Persen	10.000.000	
Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5,00	Perangkat Daerah	10.000.000	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95	Persen	7.445.840.340	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	27.512.800	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	9.926.800	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	4.250.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	4.250.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4.644.600	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	4.441.400	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	5.315.076.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	orang / bulan	5.098.887.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	211.320.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.089.000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12	Laporan	3.780.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	80.700.000	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	62.700.000	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	18.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	277.886.719	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	8.864.764	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	paket	145.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	27.541.955	

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	8.880.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	70.000.000	
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	Dokumen	17.600.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	300.865.648	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	unit	67.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	unit	233.865.648	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	1.337.096.427	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	



Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1.100.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	232.096.427	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	106.702.746	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	unit	36.702.746	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92	unit	60.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	unit	10.000.000	
					12.238.087.000	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan komunikasi dan informatika di Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam mendukung sasaran Diskominfo yaitu keterbukaan informasi publik dan indeks SPBE serta mengawal *Pontianak Smart City*. maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna. maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Pontianak, 27 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Pontianak



Drs. Zulkarnain, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660127 198603 1 009